

## Peran Perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB ( Studi Kasus di Desa Bumiayu Kabupaten Kendal)

Oleh :

Agus Bahrudin; [agusblitbang@yahoo.co.id](mailto:agusblitbang@yahoo.co.id) <sup>1)</sup>

Wahyu Wirasati ; [wahyuwirasati@yahoo.com](mailto:wahyuwirasati@yahoo.com) <sup>2)</sup>

1). Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

2). Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

### Abstrak

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB.

Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu juga memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021. Disposisi dan struktur birokrasi diwujudkan berupa dukungan dan komitmen semua pihak dimana melaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi dan pembedangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada,

Adapun faktor penghambat yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan program adalah sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk lepas dari stigma kemiskinan

**Kata Kunci : perempuan, implementasi, program, kampung , Keluarga Berencana, kasus**

### Abstract

*In order to realize a just development, the involvement of women is an absolute requirement. The role of women in development has been accommodated in various regulations related to their involvement which is very necessary for the success of development, including through the village family planning program.*

*The role of women in implementing the Kampung KB program in Bumiayu Village can be seen from 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The role of women in conveying information and implementing programs to the community is carried out through social media as a means of conveying information where every activity carried out by the KB working group is conveyed in the form of photos or videos. Besides that, it also has reliable female implementing human resources who are embodied in the management of the Bumi Sejahtera COE (Central Of Excellence) KB Village Working Group for the period 2021-2025 with SK Number 411.3/23/2021. The*

*disposition and structure of the bureaucracy is manifested in the form of support and commitment from all parties where the implementation of tasks is carried out in accordance with the main duties and responsibilities of activities that are carried out responsibly and in accordance with existing procedures and regulations.*

*The inhibiting factors faced by women in implementing the program are the difficulty of changing the community paradigm regarding family planning, the assumption that many children have a lot of sustenance, and the lack of funding for the family planning program. Meanwhile, the supporting factor is a strong awareness of the community to escape the stigma of poverty*

**Keywords: women, implementation, program, hutment, family planning, cases**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak. Hal ini selaras dengan pendapat Vivekananda (Darwin 2005:8) bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan tersebut terakomodir dalam berbagai peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyertakan keterlibatan peran perempuan dalam keberhasilan pembangunan desa.

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang merupakan gagasan presiden Jokowi yang memiliki makna desa atau kampung dalam aktualisasi 8 fungsi keluarga. Kampung KB dibangun berada pada tingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya masing-masing daerah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga,

pembangunan sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas serta meningkatkan jumlah peserta KB aktif MKJP.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, namun masalah Pembangunan Keluarga Berencana.

Menurut Surat yang diterima dari Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, ada 5 kriteria untuk masuk menjadi Kampung KB Unggulan dari 35 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, diantaranya yaitu :

1. Belum pernah mendapatkan Juara 1 Lomba Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional
2. Memiliki UPPKS
3. Aktif di WEBSITE [bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)
4. Memiliki Rumah Data dan kelengkapan administrasi Kampung KB

Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kampung KB yang ada di Jawa Tengah yang berhasil menjadi Kampung KB Percontohan Kabupaten Kendal pada Tahun 2019 dengan gelar Kampung KB COE (Central Of Excellence) dan pada tahun 2021 Desa

Bumiayu maju untuk mewakili kabupaten Kendal di ajang lomba Kampung KB terbaik tahun 2021. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran perempuan

Peran perempuan telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa khususnya program kampung KB. Diharapkan dengan dilaksanakannya 8 fungsi tersebut, keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Terkait dengan pencapaian implementasi Program Kampung KB tersebut peran perempuan menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan keluarga. Permasalahan dalam kajian ini yaitu bagaimana peran perempuan dalam implementasi program kampung KB dan apa faktor pendukung dan penghambatnya (Studi Kasus di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal}

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian peran (role )

Menurut Soerjono Soekanto (2003:243) Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang,

di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).

### 2. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi secara etimologis menurut Kamus Webster adalah sebagai berikut :

“ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).” (Webster dalam Wahab, 2005:64).

Berdasarkan pengertian Implementasi di atas Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi yang dikutip oleh Wahab, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:79).

Sedangkan Gerald Caiden dalam Thoha, (2008:116) mengatakan bahwa, ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut yakni : 1) Adanya partisipasi masyarakat (*Public Participation*), 2) Adanya strategi kebijakan (*Policy Strategies*), 3) Adanya kejelasan tentang kepentingan, 4) Adanya pelembagaan lebih lanjut dari

kemampuan public policy, 5) Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

Dari pengertian diatas dijelaskan :

- a. Partisipasi masyarakat ( *public participation*) ruang lingkup kebijakan yang pertama adalah membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat.
- b. Adanya strategi-strategi kebijakan ( *policy strategies*) sesungguhnya kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang berlandaskan akan strategi yang tepat, yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan instrumen-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interest) publik merupakan suatu objek kepentingan yang setiap orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara untuk menentukan kepentingan bersama yang di dasarkan atas pemikiran rasional dan adanya saling bertukar pikiran antara orang yang satu dan lainnya.
- d. Adanya pelembagaan yang lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik pelembagaan disini adalah diadakannya suatu lembaga riset yang independen tentang kebijakan publik untuk menggali implikasi jangka panjang dari policy dengan menggambarkan pernyataan gambaran masa depan, membuat unit baru pembuat kebijakan, merancang kembali organisasi yang menangani program, penilaian dan evaluasi dari kebijakan yang telah ada dan lain sebagainya.
- e. Adanya isi kebijakan dan evaluasi isi kebijakan mengamati tentang

pelaku-pelaku kebijakan, hubungan-hubungan diantara mereka, strategi kebijakan dan hasil yang dapat mempengaruhi sistem.

Sedangkan dalam pandangan Edwards III yang dikutip oleh Subarsono, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

(Edwards III dalam Widodo, 2007:96-110).

Komunikasi Implementasi kebijakan mensyaratkan implementor memahami apa yang harus dilakukan, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan. Disamping itu harus menyampaikan kepada kelompok sasaran tentang tujuan dan sasaran dari kebijakan dalam rangka mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif tanpa sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya finansial..

Disposisi, merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Karakteristik atau watak yang baik dari pelaksana akan berdampak pelaksanaan kebijakan menjadi sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Struktur organisasi, merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) merupakan aspek penting dalam organisasi yang menjad

pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak.

### **3. Program Kampung KB**

Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat rw, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistimatis.

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Adapun Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah:

1. Fungsi Agama,  
Melalui fungsi ini dikembangkan agar keluarga menjadi tempat penanaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa, sehingga seluruh anggota keluarga menjadi insan agamis
2. Fungsi Sosial Budaya  
Melalui dikeluarkannya budaya Indonesia sebagai dasar-dasar nilai kehidupan, sehingga anak mempunyai wawasan terhadap berbagai budaya, baik daerah maupun nasional.
3. Fungsi Cinta Kasih  
Melalui fungsi ini cinta dan kasih sayang ditanamkan di keluarga, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anggota keluarga yang lain.
4. Fungsi Perlindungan  
Melalui fungsi ini ditekankan bahwa keluarga merupakan pelindung yang pertama dan utama dalam memberikan kebenaran, keteladanan, serta tempat bernaung kepada anak dan keturunan.
5. Fungsi Reproduksi  
Melalui fungsi ini keluarga diharapkan mengetahui dan menanamkan fungsi reproduksi untuk mengatur reproduksi sehat yang terencana, sehingga anak yang dilahirkan nantinya mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas.
6. Fungsi Sosialisasi dan pendidikan  
Pendidikan dalam keluarga tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan fungsi kognitif atau mencerdaskan, akan tetapi bagaimana membentuk karakter yang berakhlak mulia.
7. Fungsi Ekonomi  
Melalui fungsi ini keluarga merupakan tempat membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan keluarga, dan merencanakan keuangan keluarga, sehingga terwujud keluarga sejahtera.
8. Fungsi Lingkungan

Melalui fungsi ini ditumbuhkan danditanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan bertujuan agar mendorong sikap dan perilaku peduli lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan penghijauan, hemat energi, dan sebagainya.

Dalam menjalankan keseluruhan fungsi tersebut dengan baik tentu membutuhkan peran perempuan. Karena itu, setiap keluarga harus mampu mempunyai arah dan tujuan ke depan.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji keterlibatan perempuan dalam implementasi kebijakan program kampung KB. Penentuan subyek penelitian dipilih secara purposive meliputi Kepala desa dan pengurus kelompok kerja Kampung KB. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam/ FGD, dan dokumentasi

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Desa Bumiayu Dan Program Kampung KB

Desa Bumiayu secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Luas wilayah desa Bumiayu adalah 1,61 km<sup>2</sup>, terletak di latitude -6,984578 dan longitude 110,077979 dengan jarak ± 1,3 km ke arah timur dari pusat kota weleri. Terletak di arah barat Kabupaten Kendal, dengan jarak 3 Km dari kantor kecamatan. Jarak Desa Bumiayu dari kantor kabupaten Kendal sekitar 20 Km.



Gambar D.1.1  
Peta Desa Bumiayu Kabupaten Kendal

Desa Bumiayu berada pada lokasi dengan perbatasan sungai Damar dan diiri dengan sungai Mati. Bumiayu memiliki 25 RT dan 8 RW serta 3 dusun yakni:

1. Dusun Lebo
2. Dusun Timbang
3. Dusun Tempel

Desa Bumi Ayu dalam melaksanakan setiap kegiatannya mengacu pada visi misi yang ada di Desa Bumi Ayu. Adapun Visi Misi tersebut yakni :

#### 1. VISI

“Melanjutkan dan meningkatkan program yang bermanfaat bagi pembangunan desa serta tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan berwibawa guna mewujudkan Masyarakat Desa Bumiayu yang JOSSS yaitu Jujur, Optimal, Sehat, Sejahtera dan Sukses.”

#### 2. MISI

##### a. JUJUR

Melakukan perubahan sistem kerja aparatur pemerintah desa yang jujur, Memberikan sistem informasi desa secara online dan terbuka, Meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat.

##### b. OPTIMAL

Mengoptimalkan kinerja dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh komponen



masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, lembaga desa, tenaga pendidik dan keagamaan, ormas, kelompok seni budaya sampai masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi segala kegiatannya yang positif.

c. SEHAT

Kesehatan Jasmani seperti kegiatan sarana dan prasarana olah raga kepemudaan, memberi penyuluhan kesehatan remaja, meningkatkan peran posyand dan mensukseskan 1 rumah 1 jamban, mengurangi rumah kurang layak huni, Kesehatan Rohani atau mendukung program masyarakat yang bernuansa Religius/keagamaan dengan memberikan beberapa bantuan fasilitas yang diperlukan

d. SEJAHTERA

Meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan melalui pendampingan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan kepada UKM, wiraswasta, petani maupun pengangguran, memfungsikan embung sebagai kawasan usaha masyarakat/UKM CENTRE dan sebagai ruang terbuka hijau, mengoptimalkan dengan pemberian modal kepada koperasi tingkat RT

e. SUKSES

Sukses dalam mengelola dana desa untuk kegiatan fisik maupun non fisik, sukses dalam peningkatan sumber daya manusia Selanjutnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dijalankan dengan struktur organisasi terlihat pada gambar berikut:

Gambar D.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Bumiayu



2. Struktur Pokja Kampung KB

Dalam pelaksanaan program kampung KB dibentuk kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021 tentang Struktur Susunan Kelompok Kerja Kampung KB Tahun 2021-2025

Gambar D.2.3 Struktur Susunan Kelompok Kerja Kampung KB Tahun 2021-2025

No	NAMA	JABATAN
1	Koch. Salsan	Pemimpin (Kepala) Desa Bumiayu
2	Wahid Kurnati	Pembantu/Deputi
3	Hosnan	Perencana
4	Dwi Santoso	Ketua
5	Dianwati	Sekretaris
6	Ti. Mubana	Bendahara
7	Suhani	Sis. Keagamaan
8	Nur Azizah	Sis. Keagamaan
9	Siti Nurayati	Sis. Kesehatan
10	Bunayati	Sis. Reproduksi
11	Dugi Rahayu	Sis. Reproduksi
12	Istiroh	Sis. Reproduksi
13	Azzah	Sis. Reproduksi
14	Siti Lailatul	Sis. Sosial Budaya
15	Ciyarti	Sis. Sosial Budaya
16	Siti Fatimah	Sis. Sosial Budaya
17	Lilwanita	Sis. Kasih Sayang
18	Nur. Hidayati	Sis. Kasih Sayang
19	Nur. Gustadi	Sis. Kasih Sayang
20	Ibni Kusni	Sis. Pembinaan Lingkungan
21	Danyah	Sis. Pembinaan Lingkungan
22	Siti Ciyarti	Sis. Pembinaan Lingkungan
23	Septi. Aytuningtyas	Sis. Pendidikan
24	Busanti	Sis. Pendidikan
25	Siti Nur Anis	Sis. Pendidikan
26	Nurjanah	Sis. Ekonomi
27	Siti Akhidah	Sis. Ekonomi
28	Surtimonah	Sis. Ekonomi
29	Tunyah	Sis. Perlindungan
30	Fita Rahayu	Sis. Perlindungan
31	Ulfa Holiwah	Sis. Perlindungan

Adapun Kampung KB mencakup berbagai macam kegiatan yang ditangani meliputi ;

1. Demensi ORTU Hebat, yang mencakup 1) Bersiap-siap menjadi orang tua 2) Memahami Peran orang tua BKB 3). Memahami Konsep Diri Orangtua 4). Melibatkan Peran Ayah 5).

- Mendorong Tumbuh Kembang Anak 6). Membantu Tumbuh Kembang Balita 7). Menjaga Anak dari Pengaruh Media 8). Menjaga Kesehatan Reproduksi Balita 9). Membentuk Karakter Anak Sejak Dini
2. BKR yaitu wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anak remaja 10-24 tahun, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja serta meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota kelompok BKR
  3. Program GENRE, yaitu suatu program untuk membantu dan memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
  4. BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
. BKL bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dengan lansia dan sendiri, meningkatkan kualitas hidup lansia, berpartisipasi, mengajar, dan meningkatkan kemandirian anggota kelompok kegiatan PUS dalam KB Adapun BKL memiliki 7 Dimensi BKL yaitu :1. Dimensi fisik 2. Dimensi Sosial 3. Dimensi Spiritual 4. Dimensi Vokasional (Profesional) 5. Dimensi Emosional 6. Dimensi Lingkungan 7. Dimensi Intelektual
  5. Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yaitu Keluarga Sejahtera, yaitu sekumpulan famili yg saling berinteraksi yg terdiri menurut banyak sekali tahapan

keluargasejahtera dan anggota rakyat yg berminat pada mewujudkan keluarga kecil sejahtera, aktif melakukan banyak sekali aktivitas beserta pada bidang bisnis ekonomi produktif

### 3. Peran Perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB

Dalam menjalankan setiap program Kampung KB di Desa Bumiayu hal yang menjadi poin penting dalam setiap pelaksanaannya adalah adanya komunikasi yang baik serta keinginan masyarakat untuk berubah menjadi dasar utama suksesnya setiap program yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bumiayu Bapak Moh Johan:

*“Pelaksanaan program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat berjalan dengan lancar dan baik karena adanya beberapa hal seperti komunikasi yang selalu jalin dengan kader PKB dan Pokja maupun masyarakat serta adanya kesadaran masyarakat untuk berubah. Hal ini dikarenakan Desa Bumiayu beberapa tahun yang lalu Desa Bumiayu merupakan salah satu desa miskin dan tertinggal, namun dengan adanya program Kampung KB ini kami berhasil menjadi salah satu desa percontohan di Jawa Tengah.”*

Dalam pelaksanaan Implementasi Kampung KB di Desa Bumiayu Faktor Komunikasi menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa pada pelaksanaannya Implementator dalam hal ini anggota dari Prokja Kampung KB telah menerapkan berbagai cara untuk dapat menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada



masyarakat salah satunya adalah dengan memanfaatkan sarana media sosial sebagai media penyampaian informasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Implementator. Akun sosial media yang aktif digunakan adalah facebook dalam laman [:https://web.facebook.com/pemdesbumiayu2003?rdc=1&rdi](https://web.facebook.com/pemdesbumiayu2003?rdc=1&rdi)

Disamping itu pihak Desa juga mewajibkan kepada setiap dusun untuk memberikan laporan dalam bentuk foto ataupun video terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh Johan selaku Kepala Desa Bumi Ayu:

*“Setiap Dusun khususnya bagi kepala dusun di wilayah Desa Bumiayu kita wajibkan untuk memberikan laporan setiap adanya kegiatan yang dilangsungkan di Dusun tersebut. Syukur apabila ada laporan tertulis juga. Setelah menerima laporan tersebut maka selanjutnya akan disampaikan ke pihak pengelola Website dan Admin Sosial Media untuk Memfollow up ke laman website dan sosial media yang kita miliki. “*

Sejalan dengan pernyataan Pembina Prokja Kampung KB Desa Bumi Ayu Kabupaten Kendal (Bapak.Rosikun) bahwa saat dalam mengimplementasikan kebijakan kampung KB di Desa Bumiayu dapat berjalan dengan baik karena adanya SDM yang mendukung:

*“Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Bumi ayu dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan dari setiap pihak. Para pihak tersebut diantaranya adalah aparatur desa, tokoh agama, tokoh kemasyarakatan, dan adanya dukungan dari masyarakat Desa Bumiayu. Selain itu pelaksanaan program Kampung KB juga didukung oleh Pemerintah khususnya BKKBN. Selain itu*

*juga didalam pengurus dari Prokja Kampung KB selalu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya sehingga hal ini membuat program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar.”*

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa Implementasi program Kampung KB di Desa Bumi ayu dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari semua pihak serta adanya Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan didalam kepengurusan Prokja Kampung KB Desa Bumi ayu sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Disamping itu kesadaran setiap seksi dari masing – masing bidang membuat pelaksanaan Implementasi Program Kampung KB dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Dwi Santoso selaku Ketua Prokja Kampung KB:

*“ Dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan dipastikan selalu mengedepankan tugas dan fungsi dari masing–masing seksi. Sehingga pelayanan yang diberikan akan maksimal dan progam yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses dan lancar.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam Implementasi program kampung KB di Desa Bumi Ayu memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi serta berkomunikasi dengan masyarakat. hal ini juga digunakan oleh Desa Bumi Ayu untuk memberikan gambaran berjalannya program yang dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui setiap program serta proses berjalannya program yang dilakukan di Desa Bumi Ayu.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari suatu sistem organisasi baik organisasi pemerintahan ataupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM yang dipekerjakan di suatu organisasi dapat menjadi pemikir, penggerak dan perencana dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi atau pelaksanaan agar dapat mencapai keberhasilan. Dalam pelaksanaan Implementasi Program Kampung KB di Desa Bumi Ayu didukung oleh SDM yang memadai melalui Pembentukan Pengurus Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera bahwa susunan Kelompok Kerja Kampung KB tahun 2021- 2025

Disamping itu kesadaran setiap seksi dari masing – masing bidang membuat pelaksanaan Implementasi Program Kampung KB dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Dwi Santoso selaku Ketua Prokja Kampung KB:

*“ Dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan dipastikan selalu mengedepankan tugas dan fungsi dari masing– masing seksi. Sehingga pelayanan yang diberikan akan maksimal dan program yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses dan lancar.”*

Berkaitan dengan pemahaman terkait dengan disposisi pelaksanaan terhadap suatu kebijakan. Bapak Rosikun selaku Pembina Prokja Kampung KB Desa Bumi Ayu Kecamatan Weleri mengungkapkan bahwa:

*“Berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung KB di Desa Bumi Ayu kami selalu berkoordinir dengan pihak BKKBN setempat dan menginformasikannya kembali dengan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan dalam setiap agenda pertemuan rutin*

*baik PKK maupun Rapat yang ada di Desa Bumi Ayu. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal dan memahami secara benar berkaitan dengan program kerja yang dijalankan.”*

Struktur birokrasi yang dimaksud oleh Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan yang menekankan perlu adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerja antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

Dari aspek struktur birokrasi tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ada . Hal ini sejalan dari pendapat Moh Johan selaku Kepala Desa Bumi Ayu menyampaikan:

*“Setiap staf dan seksi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki masing-masing seksi sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak akan terjadi penyimpangan, sehingga dapat terwujud pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Program Kampung KB.”*

Dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Bumi Ayu Kecamatan Weleri telah berjalan dengan baik dengan dilihat dari aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.yang memadai.

Dalam pelaksanaan Implementasi Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tidak lepas dari serangkaian hambatan dan kendala. Adapun hambatan yang di hadapi

seperti yang disampaikan oleh Dwi Santoso selaku Ketua Prokja Kampung KB

*“Hambatannya antara lain :1). Masih Sulitnya Merubah paradigma masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap KB bertentangan dengan aturan agama. sehingga kita berkoordinasi dengan para pemuka agama untuk dapat ikut merubah paradigma masyarakat mengenai KB,2).Anggapan banyak anak banyak rezeki, 3.)Kurangnya Pendanaan, dalam setiap menjalankan suatu program membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini masih menjadi kesulitan bagi desa karena pendanaan jika hanya mengandalkan swadaya tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh BOE KB yakni Biaya Operasional KB dari APBD Kabupaten. Tetapi jika hanya mengandalkan salah satu tidak akan dapat berjalan. Namun desa telah mengupayakan dengan meminta bantuan CSR tetapi sulitnya tidak ada perusahaan di sekitar Desa yang dapat membantu.”*

Namun demikian disamping terdapat hambatan juga memiliki faktor – faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari program yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh bapak Dwi Santoso

*“Faktor pendukung salah satunya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk dapat lepas dari stigma kemiskinan. Hal ini dikarenakan beberapa tahun kebelakang Desa Bumi Ayu merupakan salah satu desa miskin yang kemudian dengan adanya program Kampung KB ini menjadikan Desa Bumi Ayu menjadi salah satu Desa yang berkembang dan dapat ditiru oleh*

*Desa yang lain.”*

## **E. PENUTUP KESIMPULAN**

Peran perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Weleri sangat aktif yang dilihat dari 4 aspek. Dari aspek komunikasi: Implementasi program kampung KB dilakukan dengan memanfaatkan memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi serta berkomunikasi dengan masyarakat. terkait dengan program yang dilakukan. Dari SDM terlihat dari kepengurusan Prokja Kampung KB yang terdiri perempuan yang handal melakukan tugasnya sesuai pembedangannya masing – masing Dari aspek disposisi.kegiatan selalu mengedepankan koordinasi yang baik antar lembaga desa dengan masyarakat atau dengan pihak BKKBN agar pelaksanaan program KB dapat berjalan dengan baik dengan komitmen yang tinggi. Dari aspek struktur birokrasi semua kegiatan dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasi (SOP) yang sudah ditentukan.

Adapun faktor pendukungnya adanya kesadaran mengubah taraf hidup. perempuan Sedangkan faktor penghambatnya meliputi masih sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB di Desa Bumi Ayu.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan Kajian diatas direkomendasikan hal-hal sebagai berikut ::

1. Perlunya meningkatkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam mengatasi kurangnya pendanaan melalui UMKM perempuan desa dengan meningkatkan ekonomi kreatif desa.
2. Semakin ditingkat koordinasi dan komunikasi antar kader dan instansi terkait untuk menjadikan kampung

- KB bermanfaat optimal bagi perempuan
3. Pengeloaan bank data agar lebih efektif yang bisa memberikan banyak informasi pada pemerintah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Djoyomartono, Mulyono. 1991. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Semarang : IKIP Semarang Press
- Semarang Press. 1995. Mengenal penelitian kualitatif. Semarang : IKIP
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto, 1989, *Strategi pembangunan pedesaan, P3PK, UGM, Yokyakarta*.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharto, Edy. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : PTRefikaAditama.
- Sumaryadi,I,Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama.
- Winarno,Budi.,2012, *.Kebijakan Publik,CAPS,Yogyakarta*.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Pengantar kebijakan Publik*. Malang : UMM pres2008
- Widodo. 2013. *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang : Bayu Media